



BPK Soroti Aset Enam SKPD

■ Pemprov Kalbar Kembali Raih WTP

PONTIANAK, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Kalbar kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2014. Predikat ini disampaikan langsung anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar dalam Rapat Istimewa DPRD dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI kepada DPRD Kalbar di Kantor DPRD Kalbar, Senin

” Namun yang masih perlu diperhatikan adalah pengelolaan aset tetap tanah, peralatan mesin, serta gedung dan bangunan enam SKPD yaitu PU, Pertanian, Biro Umum, Dispenda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta RSUD Soedarso. ”

BAHRULLAH AKBAR

Anggota VI BPK RI

(8/6) pukul 10.00 WIB.

Bahrullah Akbar mengapresiasi upaya tindak lanjut

atas rekomendasi BPK RI yang telah dilakukan Pemprov Kalbar atas LHP Keuangan tahun 2013 sehingga dalam laporan keuangan 2014 tidak terdapat hal yang perlu diungkapkan dalam paragraf penjabar seperti pada opini tahun sebelumnya.

”Laporan keuangan pemerintah Kalbar tahun 2014 telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun yang masih perlu diperhatikan adalah pengelolaan aset tetap tanah, peralatan mesin, serta gedung dan bangunan

Perbaiki Catatan

KETUA DPRD Kalbar M Keding L mengapresiasi kinerja jajaran Pemprov Kalbar dengan diraihnya kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan anggaran tahun 2014 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

”Terkait ada beberapa yang masih ada masalah, tentunya itu sudah menja-

di target pemerintah Kalbar untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Karena ini sudah menjadi tugas moral bagi pemerintah Kalbar,” ujar M Keding L kepada wartawan usai memimpin sidang istimewa DPRD dalam penyampaian LHP BPK RI kepada DPRD

■ Bersambung ke Hal. 19

■ Bersambung ke Hal. 19



BPK Soroti Aset Enam SKPD

kepada Gubernur Kalbar," ucapnya.

Dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan agar lebih baik, BPK RI juga mendorong kepala daerah dan kepala satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

"Kami harap kepala daerah dan jajarannya bisa, melain-

kepada Gubernur Kalbar," ucapnya.

Dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan agar lebih baik, BPK RI juga mendorong kepala daerah dan kepala satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

"Kami harap kepala daerah dan jajarannya bisa, melain-

kukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah agar, dapat mempertahankan opini WTP. Serta segera mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis Akrual. Yang tidak kalah penting adalah penguatan inspektorat," ungkapnya.

Gubernur Kalbar Cornelis mengapresiasi kinerja jajarannya sehingga Kalbar

Sambungan Hal. 9

bisa mendapatkan predikat WTP. Ia berharap perbaikan terus dilakukan. "Tapi kita masih saja ada kekurangan. Semua harus kerja keras lagi," ucapnya.

Predikat WTP, jelas Cornelis, tak lepas dari pembinaan dan bimbingan BPK, termasuk keseriusan SKPD dalam melakukan laporan keuangan. "Kita harap WTP ini terus diperjuangkan," ucapnya. (rul)